

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Daftar Isi	i
II. Surat Pernyataan Pengurus	ii
III. Laporan Auditor Independen	iii
IV. Laporan Posisi Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Per 31 Desember 2021 dan 2020	1
V. Laporan Aktivitas Partai Gerakan Indonesia Raya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	2
VI. Laporan Arus Kas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	3
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	4 - 21



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, MA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Bendahara Umum
2. Nama : Satrio Dimas Adityo, MBA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Wakil Bendahara Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Partai Gerindra.
2. Laporan keuangan Partai Gerindra telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Partai Gerindra dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Partai Gerindra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Partai Gerindra.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 April 2023


Satrio Dimas Adityo, MBA
Wakil Bendahara Umum


GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT


Thomas A.M Djiwandono, MA
Bendahara Umum



Laporan No. 00082/2.0999/AU.2/11/0138-6/1/IV/2023

Laporan Auditor Independen

**Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
(Organisasi Nirlaba)**

Kami telah mengaudit posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Laporan keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum merupakan laporan konsolidasian Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 676 Tahun 2003 tentang tata administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik, serta laporan dana kampanye peserta pemilihan umum didalam Bab.I – Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) dan (7) menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan partai politik adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pimpinan partai politik di tingkat pusat dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan tahunan pengurus partai politik di tingkat Propinsi yang mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan partai politik pada jajarannya di daerah sampai dengan tingkatan yang paling rendah.

Opini

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak hal dijelaskan dalam paragraf Basis untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kantor Akuntan Publik
DJOKO, SIDIK & INDRA

 **DSI**

Drs. Abubakar Sidik, MS, CPA, CA
NRAP AP. 0138



Jakarta, 18 April 2023

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<u>ASET</u>	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
Kas dan bank	2b,3	9.700.966.975	5.867.009.462
Piutang lain-lain	4	69.002.262.051	50.611.362.051
Biaya dibayar dimuka	2c,5	7.447.200	7.447.200
Aset Terikat Untuk Investasi :	2d,6		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 3.671.111.792 tahun 2021 dan Rp.3.512.002.059 tahun 2020		1.673.083.808	677.516.541
JUMLAH ASET		<u>80.383.760.034</u>	<u>57.163.335.254</u>
 <u>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</u>			
LIABILITAS			
Biaya yang masih harus dibayar	7	71.300.000	44.400.000
Hutang lain-lain	8	161.059.900	161.059.900
Jumlah Liabilitas		<u>232.359.900</u>	<u>205.459.900</u>
ASET NETO	2g		
Tidak Terikat		80.151.400.134	56.957.875.354
Terikat Temporer		-	-
Jumlah Aset Neto		<u>80.151.400.134</u>	<u>56.957.875.354</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>80.383.760.034</u>	<u>57.163.335.254</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

LAPORAN AKTIVITAS

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	2021		2020	
		Tidak Terikat	Terikat Temporer	Tidak Terikat	Terikat Temporer
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT					
Penerimaan					
Kas Negara melalui APBN	2e,9	17.594.839.000	-	17.594.839.000	-
Iuran anggota Fraksi Gerindra DPR RI	2e,10	12.879.000.000	-	11.758.500.000	-
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	2e,11	132.289.221.345	-	130.647.073.791	-
Sumbangan Pengurus	2e,12	200.000.000	-	600.000.000	-
Lain-lain	2e,13	285.718.217	-	416.400.985	-
Jumlah Penerimaan		163.248.778.562	-	161.016.813.776	-
Pengeluaran					
Beban penerimaan kas melalui APBN	2e,14	17.594.839.000	-	17.594.839.000	-
Beban kegiatan DPP	2e,15	-	-	956.838.325	-
Beban program bidang	2e,16	13.686.800	-	320.854.752	-
Beban kegiatan sayap Partai	2e,17	446.700.000	-	583.200.000	-
Beban bakti sosial	2e,18	116.000.000	-	633.062.000	-
Beban publikasi dan kehumasan	2e,19	8.610.421.650	-	8.487.650.500	-
Beban umum dan administrasi	2e,20	113.217.701.584	-	125.040.258.657	-
Beban lain-lain	2e,21	55.904.748	-	21.106.857	-
Jumlah Pengeluaran		140.055.253.782	-	153.637.810.091	-
KENAIKAN ASET NETO		23.193.524.780	-	7.379.003.685	-
ASET NETO AWAL TAHUN		56.957.875.354	-	49.578.871.669	-
ASET NETO AKHIR TAHUN		80.151.400.134	-	56.957.875.354	-

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN ARUS KAS
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	2021	2020
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas Dari :			
Kas Negara melalui APBN	<i>2e,8</i>	17.594.839.000	17.594.839.000
Iuran anggota DPR RI	<i>2e,9</i>	12.879.000.000	11.758.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	<i>2e,10</i>	132.289.221.345	130.647.073.791
Sumbangan pengurus	<i>2e,11</i>	200.000.000	600.000.000
Penerimaan lain-lain	<i>2e,12</i>	285.718.217	416.400.985
Jumlah		<u>163.248.778.562</u>	<u>161.016.813.776</u>
Pengeluaran kas untuk :			
Beban kegiatan Partai		(139.840.239.301)	(122.436.661.675)
Piutang lain-lain	<i>4</i>	(18.390.900.000)	(41.958.372.051)
Biaya dibayar dimuka	<i>2c,5</i>	-	26.808.500
Biaya yang masih harus dibayar		26.900.000	(87.600.000)
Beban lain-lain		(55.904.748)	(21.106.857)
Jumlah		<u>(158.260.144.049)</u>	<u>(164.476.932.083)</u>
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)			
Aktivitas Operasi		<u>4.988.634.513</u>	<u>(3.460.118.307)</u>
AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	<i>2d,6</i>	(1.154.677.000)	(599.990.600)
Kas Neto Yang Digunakan Untuk			
Aktivitas Investasi		<u>(1.154.677.000)</u>	<u>(599.990.600)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		3.833.957.513	(4.060.108.907)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		<u>5.867.009.462</u>	<u>9.927.118.369</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		<u>9.700.966.975</u>	<u>5.867.009.462</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Gerindra juga merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 30 September 2020 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH, mengenai perubahan Susunan Pengurus Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Perubahan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Menyelenggarakan Kongres.
15. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina
17. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Menyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

20. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
21. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sejumlah 34 (Tiga puluh empat) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sejumlah 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

Tujuan pembentuk organisasi adalah :

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
 5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 30 September 2020 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH,MH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu	: Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH
Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu	: Prasetyo Hadi
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi	: Rohmat Marzuki
Ketua Bidang Kaderisasi	: Eko Wibowo

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI MERLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupaiah, kecuali dinyatakan lain)

II. UMLUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Sekolah Kader	: Khairisma Febriansyah
Ketua Bidang Kemasyarakatan	: Oktasari Sabil
Ketua Bidang Organisasi Sayap	: Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME
Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Luar Negeri	: Hji. Himmatul Aliyah, S. Sos, M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota Legislatif Daerah	: Bambang Haryadi, SE
Ketua Bidang Pemberdayaan Komite Daerah	: Andi Seto Gadyata Asapa, SH, LL.M
Ketua Bidang Logistik Partai	: Adhani Taufiq, S. Sos.
Ketua Bidang Saksi Pemilu	: Rizaldy Darar Priambodo
Ketua Bidang Pemetaan dan Basis Pemilih dan TPS	: Ricky HS Tamba
Ketua Bidang Kerjasama dengan Penyelenggaraan Pemilu	: Victor Du Costa
Ketua Bidang Kampanye Digital	: Ir. Seryoko
Ketua Bidang Rakayasa Teknologi	: Gumilar Satriawan, ST
Ketua Bidang Penguatan Jaringan Kader	: Hji. Novira Wijayanti, SE, MM
Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	: Haerul Saleh, SH
Ketua Bidang Pengelolaan Opini Publik	: Vasco Ruseimy
Ketua Bidang Pemberdayaan Media Sosial	: Lie Suratno
Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan LSM	: Ir. Iwan Samule
Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri	: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	: Irawan Ronodipuro
Ketua Bidang Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika	: Adien Algadri
Ketua Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa	: Edin Hadzalic, B. Sc
Ketua Bidang Timur Tengah	: H. Ricky Kurniawan, Lc.
Ketua Bidang Kerjasama ASEAN	: Drs. Marta Yandry, SE, SH, MM
Ketua Bidang Kerjasama Multilateral	: Ilman Zikri
Ketua Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia	: George Edwin Sugiharto
Ketua Bidang Hukum Internasional	: Imawaty Habie, SH
Ketua Bidang Perjanjian Antar Negara	: Hafid Assaf, SIP, MA
Ketua Bidang Kajian Kerjasama antar Parlemen	: Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
Ketua Bidang Komunikasi Internasional	: dr. Irene, M.Sc, Sp.A.
Ketua Bidang Publikasi Luar Negeri	: Drs. Beydra Yendi, MBA
Ketua Bidang Pendidikan Luar Negeri	: Abdul Hakam Nagib
Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Politik, Pemerintahan, Disiplin Partai dan Informasi Strategis	: Sugiono
Ketua Bidang Informasi dan Kajian Strategis	: Duning Wicaksana Sulistyia
Ketua Bidang Pembinaan Ideologi	: Ibnu Ariebowo, SH
Ketua Bidang Pembinaan Kerja Sama antar Lembaga Non Partai	: Abdur Rahim Hasan
Ketua Bidang Kerja Sama Antar Partai Politik	: H. Abdul Harris Bobuho, S.Sos, M.Si.
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin dan Tradisi Partai	: Chusni Mubarak, SH, MMMH.
Ketua Bidang Informasi dan Teknologi	: Herry Sumartono
Ketua Bidang Pengelolaan Data Strategis dan Pemetaan Gendernokonses	: Mochamad Hengky Kusuma Praja Cahyono
Ketua Bidang Pengelolaan Informasi	: Benny Gusman Sinaga, ST.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM - lanjutan

Ketua Bidang Pengelolaan Basis Data Kepartaian	: Fadli Tri Hartono
Ketua Bidang Penataan Aset Partai	: Farouk Mateus L. Osorio, SE, MM
Ketua Bidang Dokumentasi dan Sejarah Partai	: Bachren Luskardinul
Ketua Bidang Pemerintahan Umum	: Dr. H. Azikin Soltan, M.Si.
Ketua Bidang Pelaksana Otonomi Daerah	: Drs. H.M. Asrian Mirza, MM
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintah	: Ade Rezki Pratama, SE, MM.
Ketua Bidang Kebijakan Keuangan Daerah	: H. Dairul, SE, M.Si
Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
Ketua Bidang Penyiaran	: Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan	: Edhy Prabowo, MM., MBA
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan	: Dr. Safri, SE, M.Si.
Ketua Bidang Pertanian	: G. Budisatrio Djiwandono
Ketua Bidang Peternakan	: Agus Handoko
Ketua Bidang Perdagangan	: Heri Gunawan, SE
Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal	: Ardhya Pratiwi S, SE
Ketua Bidang Pertanian	: Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
Ketua Bidang Pendapatan Negara	: H.M Husni, SE
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan	: Drs. H. Mulyadi, MMA
Ketua Bidang Perindustrian	: Mohamad Hekal, MBA
Ketua Bidang BUMN	: Alex Yordanto
Ketua Bidang Ekspor dan Impor	: Drs. H. Subarna, SE, M.Si
Ketua Bidang Ekonomi Internasional	: Ahmad Bahtiar Sebayang, SE
Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	: Iis Edhy Prabowo, S.Hum, MM
Ketua Bidang Ekonomi Makro	: Andi Debby Yudhista Asapa, SH
Ketua Bidang Ekonomi Mikro	: Bei Mahaya Djody
Ketua Bidang Transmigrasi	: Eddy DJ. Wibowo, SH
Ketua Bidang Sosial Ekonomi Pertanian	: Farida Eddy
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Waskita Rini
Ketua Bidang Agraria	: Renny Astuti, SH, Sp.N
Ketua Bidang Pertambangan	: Boegi Nugraha
Ketua Bidang Pariwisata	: Ali Zamroni, S.Sos.
Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata	: Ir. Hj. Athea Sarastiani, MM
Ketua Bidang Pengembangan dan Pelestarian Objek Wisata	: Martini, SE
Ketua Bidang Transmigrasi	: Sammy Djusman, SE
Ketua Bidang Kerjasama Ekonomi	: Dr. Angga Wira, MM
Ketua Bidang Kesejahteraan Nelayan	: Fernando Jose Lemos Osorio Soares, ST
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan	: Andhika Surya Gumilar
Ketua Bidang Perhubungan	: Muh. Husein Fadlulloh, B,Bus,MM
Ketua Bidang Lingkungan Hidup	: Rudi Wijaya, SE
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Siti Juliati
Ketua Bidang Kehutanan	: Ir. KRT.H. Darori Wonodipuro, MM
Ketua Bidang Pertanahan	: Yoelius Dwi Hermanus, SH, M.Si.
Ketua Bidang Budaya Perikanan	: Hardjono Siswanto, SE, M.Si
Ketua Bidang Ketahanan Pangan	: drh. Muchlindo Apriliast

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILALABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi	: Muhammad Habibie
Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan	: Ramson Siagian, MBA
Ketua Bidang Energi Terbarukan	: Agus Trianto
Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan	: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
Ketua Bidang Pertahanan Darat	: Mayjen TNI (Purn) Arri Sujono
Ketua Bidang Pertahanan Laut	: Laksma TNI (Purn) Rajamorni Harahap, SE, MM
Ketua Bidang Pertahanan Udara	: Marsda TNI (Purn) Hasan Londang, M.SS
Ketua Bidang Ketahanan Nasional	: Ikhwan Amirudin, SE, MM
Ketua Bidang Pertahanan Daerah	: Agustina Foeh
Ketua Bidang Bela Negara	: Dadeng Saepudin, SE
Ketua Bidang Keamanan Nasional	: Kolonel TNI (Purn) Suhary, Z.B.
Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/Polri	: Brigjen Pol. (Purn) Drs. Wenny Warouw
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	: Yudi Handoko
Ketua Bidang Pemulihan Psikologi Pasca Bencana	: Dra. Julia Chartika, SH
Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi dan UMKM	: Dr. Ferry Joko Yuliantono, SE,Ak,Msi.
Ketua Bidang Penggalangan Massa	: Didik Hariyanto
Ketua Bidang Penggalangan Kaum Perempuan	: Ety Suryo
Ketua Bidang Relawan	: Dra. Suria Ati Kusuma
Ketua Bidang Kerjasama Organisasi Perempuan	: Edriana, SH, MA
Ketua Bidang Sosial	: Yetti Wulandari, SH
Ketua Bidang Pendayagunaan Ekonomi Rakyat	: M. Mujiburohman
Ketua Bidang Koperasi	: Adji Gutomo
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Rakyat	: Setyo Edy
Ketua Bidang Komoditas Pasar Rakyat	: Hj. Aisyah Tiar Arsyad, SE, MBA
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	: Widiyanto Saputro
Ketua Bidang Ekonomi Digital	: Hj. Gina Fadlia Swara, SE, MM
Ketua Bidang UMKM	: Kiki Setiawan
Ketua Bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima	: Ir. Lisca Suryani
Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagkerjaan	: drg. Putih Sari
Ketua Bidang Kesehatan	: dr. Benyamin Paulus Oktavianus, Sp.P.
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat	: Ir. Sri Meliyana
Ketua Bidang Kesehatan Ibu dan Anak	: Grace Rosalyn
Ketua Bidang Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	: Erni Djohan, S.Pd, M.Si.
Ketua Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Gizi	: Noveria Parasari
Ketua Bidang Keluarga Berencana	: Dr. Paramitha Sudarto, MPH
Ketua Bidang Sarana Prasarana Kesehatan	: dr. Selvi Relita Ftri, MARS.
Ketua Bidang Farmasi	: dr. Mirna Annisa, M.Si.
Ketua Bidang Tenaga Kesehatan	: Dedi Supratman, SKM, MKM
Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	: Ir. Pertiwi Awilda, MBA

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILABA)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Kesehatan Tradisional	: dr. Suir Syam, M.Kes
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	: dr. Felicitas Tallulembang
Ketua Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat	: Dra. Meiske Margaretha Mangalun, SE,MM
Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	: dr. Muhammad Atras Mafazi, MM
Ketua Bidang Kesejahteraan Tenaga Pendidik	: dr. Bambang Susanto
Ketua Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan	: Obon Tabroni
Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil	: Dewi Sigar
Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan dan Anak	: Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo
Ketua Bidang Kepemudahan	: Aryo P.S. Djojohadikusumo
Ketua Bidang Olahraga	: Abdul Karim Aljufri
Ketua Bidang Penanggulangan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	: dr. Hj. Asri Kahar Muang, MH.Kes.
Ketua Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	: Harwendro Adityo Dewanto
Ketua Bidang Perlindungan Hak dan Kesetaraan Perempuan	: Dra. Anita Ariyani
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Sasha Tutuko
Ketua Bidang Tenaga Kerja Wanita	: Ir. Dwitaria Gunadi
Ketua Bidang Pemberdayaan Kader Perempuan	: Ir. Hj. Endang Sulistiorini
Ketua Bidang Kependudukan	: Saleh Ramli
Ketua Bidang Human Trafficking	: Hj. Jamilah Abdul gani, SH, MH
Ketua Bidang Perlindungan Anak dan Remaja	: Dani Irawati Soenarso, M.Si.
Ketua Bidang Pengembangan Potensi Anak dan Remaja	: Athina Siti Khadijah P
Ketua Bidang Pengelolaan Lingkungan Ramah Anak dan Remaja	: Dinda Fajria
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi	: Habiburokhman, SH, MH
Ketua Bidang Advokasi	: M. Maulana Bungaran, SH, MH.
Ketua Bidang Hukum	: Munathsir Mustaman, SH
Ketua Bidang Hukum ITE	: M. Said Bakhrie, S.Sos,SH,MH.
Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu	: RR. Duni Nibayati, SH
Ketua Bidang Kajian Hukum	: Hendarsam Marantoko, SH,CLA
Ketua Bidang Konstitusi	: Benny Uzer, SH
Ketua Bidang Konstitusi Tata Negara	: Eva Yulianti, SH
Ketua Bidang Advokasi Kepartaian	: Yunico Syahrir, SH
Ketua Bidang Hukum Ekonomi	: Henoeh Thomas, SE, MM
Ketua Bidang Hukum Perdagangan	: Ade Salamah, SH, MH.
Ketua Bidang Advokasi Perempuan dan Anak	: Dermawati Harefa, SH
Ketua Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual	: Andika Sefatia Mendrofa
Ketua Bidang Layanan Hukum	: Muhammad Randy Effendi

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - *lanjutan*

Wakil Ketua Umum Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	: dr. Sumarjati Arjoso, SKM.
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Tri Maryani
Ketua Bidang Pembangunan Masyarakat	: Sudewo, ST, MT
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Dr. A.S. Kobalen, M.Phil, Ph.D.dillit.
Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	: Agnes Marcelina
Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	: Soedarto SM
Ketua Bidang Perlindungan Ibu Hamil dan Menyusui	: Tjut Andjani Yuzar
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel	: Ariena
Ketua Bidang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	: Endang Wahyudi Mamahit
Ketua Bidang Komunikasi Sosial Masyarakat	: Martianis, SH
Ketua Bidang Pelayanan Sosial	: Ir. Hj. R. Monica Armi Soraya
Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Infrastruktur	: Susi Marleny Bachsin, SE, MM.
Ketua Bidang Pendidikan Nasional	: Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
Ketua Bidang Pendidikan Tinggi	: Ir. Sumail Abdullah
Ketua Bidang Pendidikan Menengah	: Ir. Priscilia Ester Waworuntu, MT
Ketua Bidang Pendidikan Dasar	: Dr. Ririn Wulandari, SE, MM
Ketua Bidang Pendidikan Formal	: Indah Wahyuarini Retno U
Ketua Bidang Pendidikan Non Formal	: Martina, S.I.Kom, M.Si.
Ketua Bidang Kurikulum Pendidikan Nasional	: Indah Riyanti Brown
Ketua Bidang Kesenian Nasional	: Jamal Mirdad
Ketua Bidang Kebudayaan Nasional	: R. Wulandari (Mulan Jameela)
Ketua Bidang Perfilman Nasional	: Rachel Maryam Sayyidina
Ketua Bidang Perumahan Rakyat	: Ir. Meireza Endipat Wijaya
Ketua Bidang Konstruksi	: Sudarsono S, ST.
Ketua Bidang Pekerjaan Umum	: Ir. Aria Sulhan Witoelar
Ketua Bidang Percepatan dan Pembangunan Daerah	: Ir. Putri Tjatur Budilistyani, MM
Ketua Bidang Pembangunan Pedesaan	: Subuh Prabowo
Wakil Ketua Umum Bidang Agama	: Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan Hasyim)
Ketua Bidang Agama Islam	: H. Tabrani Syabirin, LC, MH.
Ketua Bidang Agama Kristen	: Dra. Vonny Sumampouw Pangemanan
Ketua Bidang Agama Katholik	: Haposan Paulus Batubara, SH
Ketua Bidang Agama Budha	: Romo Pdt. Gouw Tjeng Sun, S.Dt.B
Ketua Bidang Agama Hindu	: Ida Bagus Yoga Adi Putra, SH, M.Kn.
Ketua Bidang Agama Konghucu	: Sanjaya Sutandar
Sekretaris Jenderal	: H. Ahmad Muzani
Wakil Sekretaris Jenderal	: Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende, SIP.
Bendahara Umum	: Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Wakil Bendahara Umum	: Ir. Simon Aloysius Mantiri, ST, MBA
	: Satrio Dimas Adityo, MBA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Fungsi dan Tugas

6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Partai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Laporan keuangan Partai Gerindra hanya meliputi laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan merupakan laporan konsolidasi Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan bank

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

c. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>	<u>%</u>
Kendaraan	8	12,5
Peralatan kantor	4	25
Perlengkapan kantor	4	25

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktifitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktifitas .

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - *lanjutan*

e. Aset Neto

Aset bersih digolongkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer, atau terikat permanen, tergantung ada tidaknya pembatasan. Partai menyajikan hibah atau wakaf berupa kas dan aset lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah berlalu, yaitu pada saat pembatasan masa telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Sumber-sumber Keuangan Partai terdiri atas :

- Iuran wajib Anggota Partai
- Iuran sukarela Anggota Partai
- Iuran Pengurus Partai
- Sumbangan perorangan Anggota Partai
- Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Iuran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan, adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Daerah (APBN/APBD).

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

f. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

g. Perubahan Aset Neto

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu :

- Pembatasan Permanen

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

- Pembatasan Temporer

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhi keadaan tertentu.

- Sumbangan Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Perubahan Aset Neto

- Sumbangan Tidak Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

3. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas	1.967.322.298	631.853.795
Bank :		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-664-9217)	6.364.982.132	3.702.788.117
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-488-6712)	1.179.142.942	1.503.089.711
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(a/c 02-0601-003-052-303)	182.382.953	21.781.189
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-695-5291)	4.166.000	4.166.000
PT Bank Central Asia Tbk. (a/c 2063-00-5959)	2.970.650	3.330.650
Jumlah	<u><u>9.700.966.975</u></u>	<u><u>5.867.009.462</u></u>

4. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang Pengurus dan Anggota Partai	68.901.262.051	50.538.262.051
Piutang karyawan	101.000.000	73.100.000
Jumlah	<u><u>69.002.262.051</u></u>	<u><u>50.611.362.051</u></u>

Piutang Pengurus dan Anggota Partai

Akun ini merupakan jumlah pinjaman/kewajiban Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewajiban iuran anggota, pinjaman ini tidak ada jangka waktu pengembaliannya dan juga tidak dikenakan bunga.

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka atas biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 7.447.200.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan hutang Partai atas pengurusan perpanjangan STNK mobil ambulance dari Perwakilan daerah-daerah seluruh Indonesia. Beban pengurusan STNK ini di talangi dahulu oleh daerah, selanjutnya akan ditagihkan ke Dewan Perwakilan Pusat. Dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 161.059.900.

9. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pemilu 2019/2024	17.594.839.000	17.594.839.000
Jumlah	<u>17.594.839.000</u>	<u>17.594.839.000</u>

Pemilu 2019/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pemilihan Umum Pusat No. 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2019, yang menyebutkan jumlah perolehan kursi DPP Partai Gerindra tahun 2019 sebanyak 17.594.839 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara dengan nilai satu suara Rp. 1.000.

Dana bantuan yang diterima DPP Partai Gerindra dari Anggaran Pendapatan dan Beban Negara (APBN) untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 17.594.839.000.

Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

1. Pendidikan Politik

Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
- b. Seminar dan diskusi rutin

2. Operasional Sekretariat

Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang sesuai dengan Pasal 24 Bab VII dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 :

- a. Adiministrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

10. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Iuran anggota periode 2019/2024	12.879.000.000	11.758.500.000
Jumlah	<u>12.879.000.000</u>	<u>11.758.500.000</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI - lanjutan
Pemilu 2019/2024

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2019/2024, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 78 kursi atau sekitar 12,57% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, DPP Gerindra menerima iuran anggota masing-masing sebesar Rp. 12.879.000.000 dan Rp. 11.758.500.000 dari 78 orang anggota yang duduk di kursi DPR-RI.

11. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Iuran anggota periode 2019/2024	132.289.221.345	130.647.073.791
Jumlah	<u>132.289.221.345</u>	<u>130.647.073.791</u>

Akun ini merupakan iuran wajib anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Provinsi dan Kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Bab X Pasal 59, yaitu iuran bulanan DPR dan DPRD sebesar 25% dari gaji dan tunjangan.

Iuran anggota periode 2019/2024

Pada periode 2019/2024 iuran anggota DPRD per bulan mengalami kenaikan, untuk Dewan Pimpinan Daerah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Dewan Pimpinan Cabang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per anggota. Dari iuran sebagian dikirim kembali ke daerah perwakilan masing-masing dan sebagian digunakan untuk operasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP). *Lihat catatan 20*

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, DPP Gerindra menerima iuran anggota masing-masing sebesar Rp. 132.289.221.345 dan Rp. 130.647.073.791 dari Dewan Pimpinan Daerah 285 anggota dan Dewan Pimpinan Cabang 1.971 anggota.

12. SUMBANGAN PENGURUS

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari Pengurus Partai yang digunakan untuk biaya operasional Partai, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 dan Rp. 600.000.000.

13. PENERIMAAN LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasagiro	285.718.217	365.081.915
Lain-lain - <i>lihat catatan 7</i>	-	51.319.070
Jumlah	<u>285.718.217</u>	<u>416.400.985</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendidikan Partai Politik	10.579.313.503	16.076.224.305
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	4.077.628.600	-
Pengadaan inventaris kantor	775.332.500	638.800.000
Beban pemeliharaan data dan arsip	758.510.584	14.792.667
Alat tulis kantor	507.735.738	82.447.676
Listrik dan telepon	442.467.894	494.760.376
Beban transportasi dan perjalanan dinas	268.518.601	148.851.976
Media cetak dan elektronik	75.788.350	74.966.000
Beban rapat internal Pengurus	66.579.830	17.226.500
Beban rumah tangga	42.759.000	44.722.000
Jasa pos dan giro	204.400	2.047.500
Jumlah	<u>17.594.839.000</u>	<u>17.594.839.000</u>

DPP Partai Gerindra telah menggunakan Bantuan Partai Politik (Banparpol) dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Proporsi Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar 60,13% dan 91,37% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat masing-masing sebesar 39,87% dan 8,63%.

Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada :

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
- b. Pasal 30 :
 1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
 2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

15. BEBAN KEGIATAN DPP

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>
Beban HUT Gerindra	734.492.825
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)	222.345.500
Jumlah	<u>956.838.325</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILRABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BEBAN PROGRAM BIDANG

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban Bidang Kesehatan	13.686.800	5.952.657
Pendidikan dan Latihan Gerindra Masa Depan (GMD)	-	314.902.095
Jumlah	<u>13.686.800</u>	<u>320.854.752</u>

Pendidikan dan Latihan Gerindra Masa Depan (GMD)

Akun ini merupakan beban atas pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk kader-kader Gerindra Masa Depan (GMD) yang dilaksanakan di Hambalang Bogor Jawa Barat.

17. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ambulance	336.700.000	313.200.000
Kesehatan Indonesia Raya (Kesira)	65.000.000	160.000.000
Perempuan Indonesia Raya (Pira))	45.000.000	110.000.000
Jumlah	<u>446.700.000</u>	<u>583.200.000</u>

18. BEBAN BAKTI SOSIAL

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kegiatan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sumbangan masyarakat	116.000.000	633.062.000
Jumlah	<u>116.000.000</u>	<u>633.062.000</u>

19. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban Digdaya TV	8.500.000.000	8.000.000.000
Atribut partai	61.500.000	335.000.000
Maintenance Website	44.211.650	151.690.500
Langganan majalah dan koran	4.710.000	960.000
Jumlah	<u>8.610.421.650</u>	<u>8.487.650.500</u>

Beban Digdaya TV

Akun ini merupakan biaya operasional setiap bulannya Digdaya TV (PT Digdaya Media Nusantara) yang digunakan untuk acara siaran Partai Gerindra di seluruh Indonesia.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN - lanjutan

Media center dan team online

Merupakan biaya yang dikeluarkan Partai atas pembuatan dan pemasangan iklan di media massa.

Atribut partai

Merupakan biaya yang dikeluarkan DPP Partai atas pembuatan kaos, bendera, pin serta biaya pengiriman atribut-atribut tersebut diseluruh Indonesia.

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban operasional	107.873.676.597	119.356.010.000
Gaji dan tunjangan	3.661.825.001	3.615.295.834
Beban transportasi dan perjalanan dinas	503.009.582	531.004.879
Beban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	310.849.214	266.568.329
Beban penyusutan aset tetap	159.109.733	259.781.559
Beban jamuan	87.086.470	67.035.302
Listrik, telepon dan internet	75.173.458	4.720.000
Beban rumah tangga	59.061.434	52.273.511
Beban jasa profesional	44.400.000	44.700.000
Beban pajak PPh Pasal 21	34.800.500	33.747.500
Beban jasa keamanan dan kebersihan	17.600.000	22.574.000
Alat tulis kantor dan percetakan	9.759.900	298.297.446
Beban inventaris dan instalasi kantor	6.643.035	2.775.047
Beban pemeliharaan	4.611.901	124.106.596
Beban rapat internal Pengurus	2.917.930	4.359.021
Biaya pengiriman barang	825.500	161.000
Beban konsumsi	-	37.455.028
Beban kebutuhan kantor	-	5.341.520
Perizinan, Hukum dan Advokasi	-	1.800.000
Lain-lain	366.351.329	312.252.085
Jumlah	<u><u>113.217.701.584</u></u>	<u><u>125.040.258.657</u></u>

Beban Operasional

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban operasional Sekretariat	59.249.176.597	76.176.810.000
Beban operasional DPD dan DPC	47.875.000.000	42.272.500.000
Beban operasional Tim Online	739.500.000	698.000.000
Beban operasional Bendahara	10.000.000	208.700.000
Jumlah	<u><u>107.873.676.597</u></u>	<u><u>119.356.010.000</u></u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILRABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI - *lanjutan*

Beban operasional DPD dan DPC

Akun ini merupakan beban operasional Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dananya dari iuran bulanan anggota Dewan-Dewan Daerah setelah dipotong untuk biaya operasional Dewan Pimpinan Pusat. (*lihat catatan 11*)

21. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 55.904.748 dan 21.106.857.

22. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang diselesaikan pada tanggal 18 April 2023.